

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Menjadi sumber acuan referensi dan sebagai bahan rujukan penulis dengan apa yang diteliti dan dianalisis dalam sub pembahasan nanti, terdapat beberapa jumlah penelitian terdahulu yang terlihat sangat berkaitan dan relevan guna mendukung penulisan penulis dalam penelitian ini. Adapun beberapa referensi penelitian yang bersumber dari penulisan skripsi ataupun jurnal, sebagai berikut:

Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Temuan Penelitian
Nurlatipah Nasir. 2016	Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik di Indonesia : Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik Dengan Konstituen.	Dilihat dari hasil penelitian ini, sistem kepartaian merupakan salah satu alat dan pilar demokrasi yang sangat penting, tanpa partai maka demokrasi tidak dapat berfungsi dalam proses demokratisasi, dan proses demokrasi masih mencari keberadaan partai, tidak hanya penting untuk kelangsungan demokrasi, tetapi

		<p>demokrasi juga penting untuk perkembangan partai politik itu sendiri, masalah yang dihadapi partai politik adalah karena jarak antara partai dan masyarakat (pemilih), pemilu sangat tidak stabil. , dari pemilu yang sangat fluktuatif ini Ada hubungan antara volatilitas dan institusionalisasi partai, dengan institusionalisasi partai yang rendah menyebabkan volatilitas pemilu yang tinggi.</p>
<p>Aryo Wasisto. 2016</p>	<p>Volatilitas Pemilihan Pada Pemilu Presiden 2019 : Studi di Jakarta dan Depok, Indonesia</p>	<p>Dari hasil temuan pada tulisan ini menemukan bahwa kepentingan politik memiliki pengaruh yang signifikan dan berbanding terbalik dengan fluktuasi sikap intra-pemilu karena dipengaruhi oleh keinginan untuk belajar tentang politik, dan</p>

		<p>kepentingan politik mendukung persepsi kualitas pemilih. dan motivasi. Dalam hal partisipasi politik, temuan ini menduga bahwa, karena subjektivitas, pendidikan, dan pengetahuan politik tidak berpengaruh signifikan terhadap volatilitas elektoral, evaluasi kandidat mungkin hanya setengah dari cara pemilih menilai kandidat, sehingga membutuhkan faktor lain seperti mobilisasi massa. dipertimbangkan. Searchable dan politik uang serta kemampuan internet dan media sosial untuk meningkatkan informasi pemilih.</p>
Sobirin Malian. 2016	Menakar Loyalitas dan Volatilitas Pemilih Pada Pemilu 2004	Dapat disimpulkan bahwa pemilih yang loyal, terutama yang

		<p>berbasis masyarakat tradisional, akan tetap stabil, sedangkan volatilitas akan secara signifikan mengganggu perolehan suara oleh partai-partai besar. Dilihat dari hasil penelitian ini, pemilih akan cenderung lebih mempercayai partai elit daripada partai itu sendiri, sehingga sangat penting bagi partai baru untuk mengemas citranya secara kompeten di depan pemilih, karena sentimen pemilih tidak mudah berubah, cenderung menghasilkan pola pemilihan yang individualistis atau sangat personal yang bergantung pada keahlian elit dalam berkomunikasi dengan pemilih.</p>
--	---	--

<p>Imam Yudhi Prastya., MPA dan Yudhanto S.A., MA.</p>	<p>Dinamika Demokrasi Elektoral (Studi Tentang Sentimen Anti-Partai Di Era Reformasi)</p>	<p>Penelitian ini yang dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa pengaruh terhadap volatilitas apabila dari masyarakat memiliki sentimen kepada partai politik. Keberadaan partai politik di suatu negara dipandang oleh banyak pihak sebagai bentuk pengakuan hak-hak sipil dan politik, sehingga keberadaan partai politik muncul di awal proses egalitarianisme politik kewargaan. Penelitian ini mengadopsi metode fenomenologi, melihat makna dari struktur pemahaman subjek, dan penelitian kepustakaan juga menggunakan wawancara mendalam sebagai inti pengumpulan data. Menguatnya sentimen antipartai kita dapat dilihat di beberapa</p>
--	---	--



		<p>pemilu selama periode reformasi: pada tahun 1999, 2004 dan 2009, jumlah pemilih menurun, volatilitas pemilih dan identifikasi partai menurun, yang juga dilaporkan dari partai politik, pendirian tersebut menunjukkan efek sentimen anti-partai, baik reaktif maupun kultural.</p>
Wira Handoko. 2010	<p>Pergeseran Perilaku Memilih Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 (Studi Kasus Di Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan)</p>	<p>Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran perilaku pemilih dalam pemilu merupakan gerakan, yaitu pergeseran pilihan masyarakat dari satu partai politik ke partai politik lain atau dari satu caleg ke caleg lainnya. Perubahan perilaku pemilih Indonesia dapat dilihat dari jumlah wakil rakyat dan jumlah suara sah. Faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku pemilih antara lain</p>

		faktor keluarga, kepribadian calon, kekecewaan masyarakat terhadap kinerja partai, politik uang, dan melemahnya ideologi partai politik. .
--	--	--

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Partai Politik

Partai politik dalam sebuah negara merupakan suatu instrumen yang tidak terpisahkan dalam sistem demokrasi pada suatu negara, partai politik menjadi suatu perwujudan dalam kebebasan berekspresi masyarakat guna mewujudkan kepentingan-kepentingannya. Kelahiran daripada partai politik bisa dikatakan sebagai hasil dari pertempuran antar pemikiran yang terjadi di masyarakat, karena partai politik hadir dengan peran sebagai representasi dari pemikiran masyarakat.¹ Dalam sebuah negara yang sekalipun tidak demokrasi partai politik menjadi peranan penting dalam sebuah sistem.

Keberadaan partai politik adalah salah satu wujud dari pelaksanaan hak asasi manusia tersebut untuk berkumpul, berserikat dan mengemukakan pendapat selain itu juga demi berjalannya demokrasi yang baik dalam suatu negara, dari partai politik modern yang terstruktur, adanya pemilihan umum berkala, dan beroperasinya kelompok-kelompok penekan, demokrasi berjalan sebagai suatu

¹ Firman Subagyo, Menata Partai Politik dalam Arus Demokrasi, (Jakarta: RMBOOKS, 2009). Hal. 57

mekanisme.² Keberadaan partai politik juga tidak lepas dari aspek masyarakat Indonesia yang terbilang majemuk dan dalam tatanan sosial masyarakatnya saling hidup berdampingan satu sama lainnya.

Di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011 sudah dijelaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Miriam Budiardjo mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.⁴ Tujuan dari adanya organisasi politik ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan kepentingan-kepentingan yang telah mereka rencanakan dan ingin diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang akan dijalankan.⁵

Pada negara demokrasi, partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik dalam negara, partai politik terlahir untuk mewujudkan suatu gagasan bahwa rakyat merupakan suatu faktor yang perlu diikuti sertakan dalam

² Ricardo Blaug And John Schwarzmantel Sebagaimana Dikutip Oleh M.Ali Safa'at, Pembubaran Partai Politik, (Jakarta:Rajawali Press,2011), Hal.7.

³ Robbani Mushab, "The Implementation Of A Political Party Based On The Laf Of A Political Party In Bandar Lampung (Study in Partai Keadilan Sejahtera DPD Bandar Lampung, 2016)".

⁴ Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*, Hal.5.

⁵ Syamsuddin Haris, Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi. Hal. 23

proses politik dalam menyalurkan aspirasinya dan kepentingannya, dalam negara demokrasi juga partai politik, pemilihan umum, dan struktur pemerintahan menjadi unsur-unsur yang juga tidak dapat dipisahkan dalam sistem pemerintahan demokrasi, karena dalam perjalanannya khususnya partai politik secara praktik dilapangan acapkali melakukan pendekatan kepada masyarakat guna menampung aspirasi daripada masyarakat itu sendiri.⁶

Dari definisi yang cukup bervariasi diatas, peneliti bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa partai politik adalah organisasi politik resmi yang dibentuk oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan dengan cara menempatkan anggota-anggota mereka dalam pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum, terlepas dari tujuan tersebut yang telah dibangun secara bersama-sama untuk kepentingan organisasi, dengan begitu partai-partai politik memiliki fungsi yang sangat fundamental bagi masyarakat dalam praktiknya dilapangan, yaitu sebagai alat komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan pengendali konflik:

2.2.3.1 Komunikasi Politik:

Pada sistem kenegaraan yang terstruktur, partai politik memiliki fungsi sebagai alat komunikasi politik, dalam hal ini partai politik memiliki peran sebagai komunikator antara pihak yang diperintah dengan pihak yang memerintah, pada peran ini partai politik harus bisa menjalankan dengan sebaik mungkin agar citra partainya tidak merosot dihadapan masyarakat apabila pesan yang

⁶ Edison Muchlis, Pelembagaan Partai Politik Di Indonesia Pasca Orde Baru, (Jakarta: Lipi Press, 2007), Hal.3.

disampaikan oleh masyarakat tidak terlaksana oleh pemerintahan yang sedang berjalan, karena dalam hal ini partai politik harus bisa menyalurkan dan mengolah dari pesan-pesan politik masyarakat begitupun dengan sebaliknya.

Partai politik harus bisa juga menyalurkan pesan politik yang disampaikan oleh pemerintah untuk masyarakat, dalam hal penyampaian tersebut, sangatlah penting bagi partai politik mengolah dan mengemas pesan-pesan tersebut, dalam melaksanakan fungsi ini, partai politik tidak begitu saja menyampaikan segala tuntutan masyarakat kepada pemerintah, tetapi dirumuskan sedemikian rupa sehingga penerima informasi dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkan secara bijak agar tidak menghasilkan banyak tafsiran atas pesan yang sebagaimana mestinya diberikan.

Dalam fungsi ini partai politik harus bisa menunjukkan perannya sebagai jembatan komunikasi yang baik dihadapan masyarakat maupun dihadapan pemerintahan dalam menampung dan menyalurkan pesan-pesan politik dari antara dua pihak tersebut, karena apabila tidak pandai untuk menjadi jembatan politiknya maka partai politik harus siap kehilangan citra baiknya dari penilaian masyarakat yang akan berdampak kepada partai politik saat pemilihan berlangsung, namun apabila ingin tetap eksis pada dunia perpolitikan maka partai politik harus bisa menjalankan fungsi ini yaitu sebagai jembatan komunikasi politik.

2.2.3.2 Sosialisasi Politik:

Pada fungsi ini partai politik juga berperan menjadi penghubung kepada masyarakat, sama halnya dengan fungsi sebagai komunikasi politik, partai politik dalam hal ini dapat melakukan pendidikan politik dengan mensosialisasikan seperti hak dan kewajiban masyarakat sebagai pemilih saat sebelum dan pada berlangsungnya pemilihan, sosialisasi tersebut dapat dilakukan oleh partai politik dengan berbagai cara, seperti di zaman modern seperti saat ini, sosialisasi politik bisa dilakukan melalui media online ataupun media lainnya.

Berkaitan dengan fungsi partai politik lainnya, fungsi yang ada sebagai partai politik memiliki tujuan salah satunya untuk mencari perhatian baik dari masyarakat supaya dalam menghadapi kontestasi politik seperti pemilu legislatif, partai politik dapat meraup banyak perolehan suara dari masyarakat pemilih. Fungsi sosialisasi ini juga dapat merujuk kepada pengetahuan dasar dari pemikiran pemilih terhadap politik, pendidikan politik kepada masyarakat amat penting untuk diketahui oleh masyarakat awan khususnya, sebagai partai politik tidak ingin masyarakat sebagai kebutuhannya buta akan pengetahuan terhadap politik, karena apabila rendahnya pengetahuan politik masyarakat akan berpengaruh kepada tingkat partisipasi dalam konstestasi politik.

2.2.3.3 Rekrutmen Politik:

Dalam kehidupannya, partai politik memiliki tugas sebagai tempat rekrutmen, tujuan adanya fungsi seperti ini pada partai politik adalah untuk menjadi jalan buat prospek panjang bagi partai dalam sistem pemerintahan, karena dalam fungsi ini partai politik melakukan penyeleksian dan pengangkatan seseorang untuk menjadi bagian dari partainya, dan dalam prospek panjang tersebut partai politik sendiri tidak akan kekurangan kader-kadernya yang akan bersama-sama dan terus berjuang bersama dalam satu identitas.

Hasil dari pola perekrutan tersebut juga akan menambah masa umur sebuah partai dalam pengalokasian kadernya kepada struktur pemerintahan, sistem perekrutan ini juga penting bagi partai politik karena dengan mekanisme seperti ini partai politik mendapatkan tambahan tenaga manusia untuk terus menjalankan regenerasi dalam struktur organisasi, dalam proses rekrutmen juga, pastinya partai politik menyesuaikan pemikiran serta ideologi segelintir masyarakat yang secara pemikiran satu tujuan dengan partai politik yang dianutnya.

Dengan adanya rekrutmen politik maka dimungkinkan terjadinya rotasi calon mobilitas politik, tanpa rotasi dan mobilitas politik pada sebuah sistem politik, maka akan muncul diktatorisme dan stagnasi politik dalam sistem tersebut. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

2.2.3.4 Pengendali Konflik:

Dalam fungsi ini, partai politik sebagai salah satu lembaga pemerintahan harus dapat menjadi pengendali dalam konflik yang terjadi dengan berdialog kepada pihak-pihak yang berkonflik akibat memiliki latar belakang yang berbeda, dari hal itu partai politik setelah menampung permasalahan yang terjadi selanjutnya partai politik berdiskusi secara internal ataupun eksternal dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian terhadap suatu konflik yang terjadi.

Karena dalam sebuah negara yang heterogen dengan beragam asal-usulnya tidak dapat dihindarkan dengan adanya konflik, oleh karena itu hadirnya partai politik dalam kehidupan sosial bernegara memiliki fungsi sebagai pengendali konflik, sebagaimana di kehidupan negara yang non demokratis, tidak adanya pengendali konflik dalam kehidupan bernegaranya, maka sistem-sistem pemerintahan yang sudah berjalan juga akan berpengaruh atas adanya konflik di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2.2.2 Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi, partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik dikarenakan adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang dalam hal ini bertindak sebagai pribadi atau diri sendiri yang bermaksud untuk

dapat berpengaruh secara damai, legal ataupun efektif dalam pemilihan yakni melakukan pemilihan .

Samuel P. Huntington dan Nelson mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan yang dilakukan warga negara dengan tujuan untuk menentukan arah kemana sebuah negara yang ditinggalinya berjalan, oleh karena itu keterlibatan masyarakat dalam hal ini menjadi partisipasi dalam pemilihan menjadi suatu hal penting yang harus dipahami oleh setiap individu masyarakat, karena arah bangsa akan kemana itu tergantung kepada keputusan masyarakat dalam memilih siapa atau partai apa yang layak memimpin kehidupan mereka dalam bermasyarakat yang dilakukan oleh masyarakat.⁷

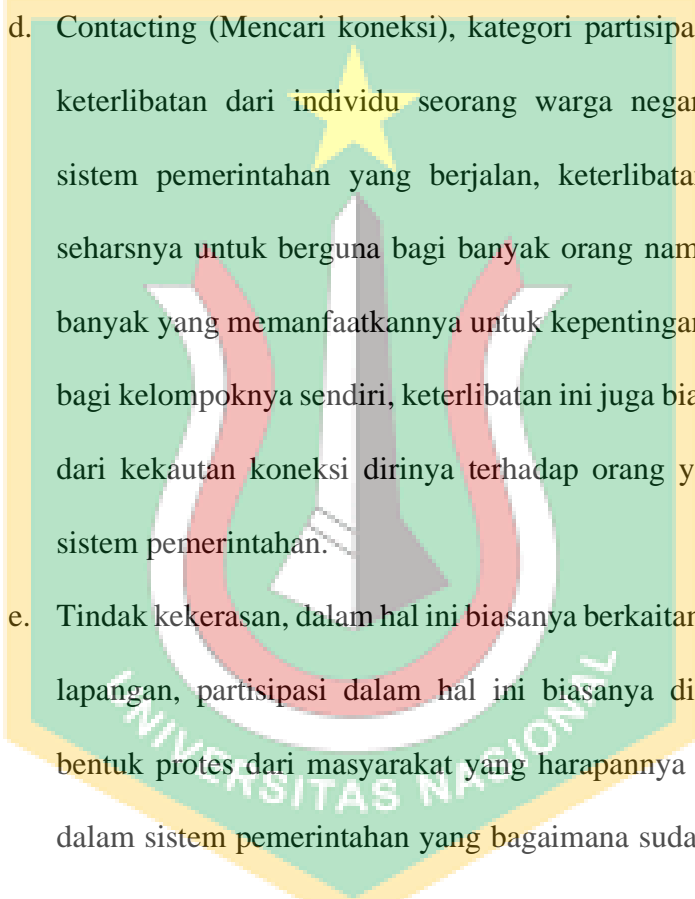
Bentuk-bentuk dari partisipasi politik sangat beragam, namun dalam hal ini kategori partisipasi politik ditujukan dalam hal adanya keterlibatan dalam pemilihan yaitu menjadi barisan dari para masyarakat pemilih. Tiada demokrasi tanpa partisipasi politik warga, sebab partisipasi merupakan esensi dari demokrasi, apabila suatu negara membatasi akses dan keterlibatan warganya dalam setiap kegiatan perpolitikan maka dipastikan bahwasannya demokrasinya belum dapat dikatakan berkembang secara baik tetapi karena adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi ukuran elementer untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu negara.

⁷ Samuel P. Huntington Dan Joan Nelson, Partisipasi Politik Di Negara Berkembang, Terj. Sahat Simamora (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1994), Hal.4.

Dan disisi lain juga mereka Huntington dan Nelson mengemukakan bahwasannya berdasarkan kepada kenyataannya, partisipasi politik terbagi kedalam berbagai bentuk-bentuk dan jenis dalam praktek dilapangannya dan berdasarkan kepada tujuan daripada partisipasi politik itu sendiri, oleh karena itu mereka mengelompokkan partisipasi politik sebagai berikut yang terdiri dari:

- a. Kegiatan pemilihan, dalam hal ini Huntington dan Nelson mendefinisikan yang dimana keterlibatan partisipasi politi dalam pemilihan tidak hnaya berpaku kepada pengambilan suara melainkan juga kepada memberikan bantuan atau sumbangan tenaga dalam melakukan kampanye partai politik ataupun calon dari partai politik yang bertujuan untuk mencari suara dari hasil pengambilan citra baik yang dilakukan oleh masyarakat untuk dapat bisa berpengaruh dan mempengaruhi pada saat pemilihan dalam hal perolehan suara.
- b. Lobbying, dalam hal ini didefinisikan yang bahwasannya partisipasi politik bisa menjadi sebagai komunikator dalam program-program yang akan dijalani oleh pemerintahan dengan melibatkan keterlibatan dari banyak masyarakat yang tujuannya untuk mendapat apresiasi terhadap suatu pemerintahan yang sedang berjalan.
- c. Menjadi kelompok organisasi politik atau sistem pemerintahan, adanya partisipasi politik dalam hal ini menjadi suasana yang tidak asing bagi semua orang, dalam hal ini adanya keterlibatan dalam

organisasi politik atau struktur pemerintahan yang sedang berjalan harus memiliki tujuan yang gunanya untuk menuntun atau mempengaruhi arah jalannya sistem pemerintahan dan untuk dapat mempengaruhi juga pengambilan dalam proses perencanaan yang ada untuk dapat mengarahkan kepentingan perhatiannya kepada persoalan umum yang beraneka ragam.

- 
- d. Contacting (Mencari koneksi), kategori partisipasi ini merupakan keterlibatan dari individu seorang warga negara dalam arahan sistem pemerintahan yang berjalan, keterlibatan dalam hal ini seharusnya untuk berguna bagi banyak orang namun dalam hal ini banyak yang memanfaatkannya untuk kepentingan diri sendiri atau bagi kelompoknya sendiri, keterlibatan ini juga biasanya bersumber dari ketakutan koneksi dirinya terhadap orang yang berada pada sistem pemerintahan.
- e. Tindak kekerasan, dalam hal ini biasanya berkaitan dengan kegiatan lapangan, partisipasi dalam hal ini biasanya digunakan sebagai bentuk protes dari masyarakat yang harapannya tidak terjalankan dalam sistem pemerintahan yang bagaimana sudah dijanjikan oleh pemerintahan terpilih pada saat kampanye atau branding dirinya maupun branding partai politiknya.

Dapat disimpulkan partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan

keputusan, serta merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan warga secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah.

Dalam sebuah pemilihan umum ataupun pemilihan legislatif, partisipasi politik amat dibutuhkan keterlibatannya dalam kegiatan pemilihan, bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilihan diharapkan terdorong akibat adanya sebuah keyakinan yang menjelaskan bahwasannya melalui kegiatan bersama itu, kepentingan mereka akan tersalur atau sekurangnya diperhatikan yang dengan kata lain dalam hal ini adalah bahwasannya keterlibatan mereka dalam politik menjadi sebuah hal yang akan terus diperhatikan dan harapannya telah memiliki efek terhadap perpolitikan di Indonesia dan dikarenakan perilaku dari partisipasi politik juga dalam memilih akan mempengaruhi masa depan negara.

2.2.3 Konsep Branding Politik

Pemasaran Politik bisa didefinisikan sebagai proses analisis, perencanaan, impletasi, dan pemilihan umum, yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan membina hubungan pertukaran yang saling menguntungkan antara partai politik dalam hal ini sebagai infrastruktur politik dengan pemilih, untuk tujuan mencapai tujuan pemasar politik.

Oleh sebab itu, pemasaran atau branding politik cukup penting dikuasai oleh setiap individu ataupun dalam hal ini partai politik untuk bisa men-deliver pesan dan tujuan politiknya kepada masyarakat secara luas, dengan demikian, bukan berarti ilmu pemasaran memang ditujukan untuk memasarkan produk, agar bisa diterima konsumen. Dalam hal ini, para kandidat peserta Pemilu, termasuk Kandidat Kepala Daerah, merupakan “produk” yang ditawarkan kepada konstituen (masyarakat).

Pemasaran politik ini pun juga menekankan pentingnya penggunaan proses segmentasi untuk memetakan keinginan dan kebutuhan pemilih. Sehingga kandidat dalam hal ini partai politik maupun individu bisa meposisikan dirinya secara pribadi atau secara kelompok dalam menawarkan ide dan gagasannya kepada pemilih secara luas.

Strategi Branding adalah bagian yang sangat mendasar dari kegiatan pemasaran yang sangat penting untuk dimengerti atau dipahami secara komprehensif. Objektif dari suatu strategi branding yang baik adalah dapat menyampaikan pesan dengan jelas, dapat mengkonfirmasi kredibilitas pemilik brand tersebut, dapat menghubungkan dengan target pemasaran yang lebih personal, memotivasi pembeli atau dalam hal ini pemilih untuk menciptakan loyalitas pemilih.⁸

⁸ Smith, K. T. The Marketing Mix Of Imc: A Move From The 4 P's To The 4c's. Journal Of Integrated Marketing Communicatons, (2003). Hal. 1-3.

Branding politik atau political branding ialah sebuah teknik lama yang memang lazim jika digunakan oleh para konstestan politik dalam mendapatkan sebuah popularitas selama masa kampanye berjalan. Meskipun konstestan tidak dijamin mendapatkan kemenangan tetapi brand politik menjadi sebuah senjata yang kuat dalam menciptakan kampanye memiliki suasana berbeda lebih mengarah kepada hal yang efektif dan efisien.

Dalam politik strategi merupakan hal yang paling fundamental seorang individu maupun kelompok dalam hal ini partai politik untuk menyajikan ide dan gagasannya dalam pemilihan agar nantinya dalam proses pemilihan hal-hal yang disampaikan kepada pemilih dapat dengan mudah diterima dan mendapat suatu keuntungan bagi individu maupun kelompok dalam hal ini partai politik untuk dipilih dalam proses demokrasi yang berjalan.

Maka dari itu, untuk sukses di dalam suatu strategi branding, perlunya memahami kebutuhan serta keinginan dari pemilih serta prospek atau calon pemilih. Strategi branding politik kerap kali digunakan untuk mengatur bagaimana segmentasi ide dan gagasan yang nantinya akan dibawa oleh individu atau partai politik kepada pemilih. Sehingga nantinya eksekusi yang dilakukan terhadap segmentasi pemilih tertentu, misal dalam hal ini pemilih muda, pemula maupun pemilih ideologis dapat menjadi tepat sasaran.

2.3 Kerangka Pemikiran

Partai politik menjadi suatu hal yang fundamental dimata masyarakat awam, oleh karena itu peran partai politik di pandangan masyarakat sangat krusial untuk menampung dan membaking kepentingan-kepentingan masyarakat yang sangat dibutuhkan, apabila sebuah partai politik tidak dapat menjadi peran dalam hal itu, maka akan berpengaruh kepada dirinya saat adanya kontestasi politik baik pemilu ataupun pileg.

Selain memiliki peran sebagai penyelesai masalah, partai politik juga memiliki peran sebagai alat komunikasi bagi masyarakat atau bagi basis pemilihnya sendiri khususnya, di kehidupan politik, pola marketing partai politik amat sangat mempengaruhi tingkat partisipasi memilih dalam pemilihan umum, perilaku marketing partai politik apabila tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan masyarakat atau pemilih, dapat menimbulkan perilaku pemilih memilih yang berbeda dalam pemilihan umum.

Perilaku pemilih akan dapat memiliki dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan partai politik kedepan khususnya, apabila perilaku pemilih ini sudah tidak nyaman dengan pilihan awalnya maka akan menimbulkan perubahan pilihan dari pemilih terhadap partai politik pilihannya, sehingga berdampak pula kepada sebuah sistem kepemimpinan suatu daerah atau tempat, dan dengan begitu akan berubah juga pola perjalanan dan perkembangan kehidupan masyarakat.

Peristiwa pergeseran suara yang dilakukan oleh para pemilih di dalam memberikan hak suaranya baik pada pemilu ataupun pileg menjadi sebuah hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh sebuah partai politik khususnya dalam hal ini adalah Partai Persatuan Pembangunan, hal ini sangat berpengaruh atas dasar sebuah ideologi dari partai itu sendiri.

Oleh sebab itu, partai politik apapun dan dimanapun baik nasional ataupun tingkat lokal harus selalu bisa menjadi role model dari basis pemilihnya untuk tetap bisa mempertahankan basis daripada pemilihnya, hal itu akan menjadi kunci sendiri bagi sebuah partai politik untuk tetap terus mempertahankan kehidupan partainya dikancah kontestasi politik seperti pemilu ataupun pemilu legislatif yang artinya dalam pemilihan partai politik untuk memimpin dalam suatu sistem yang berada di tempat atau lokasi dimana partai tersebut berada.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran

